

# Tingkat Kesiapan Masyarakat Kecamatan Sayung Terhadap Rencana Pengintegrasian Pembangunan Tanggul Laut Dengan Jalan Tol Semarang-Demak

E. S. M Biruni<sup>1</sup>, W. Kurniawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Diponegoro, Indonesia

## Article Info:

Received: 06 April 2020

Accepted: 03 May 2021

Available Online: 11 May 2021

## Keywords:

sea wall; community readiness;  
resident of Sayung district

## Corresponding Author:

El Sifa Mega Biruni  
Diponegoro University,  
Semarang, Indonesia  
Email:  
[el.sifa19@pwk.undip.ac.id](mailto:el.sifa19@pwk.undip.ac.id)

**Abstract:** *The plan for the construction of sea wall in Sayung Subdistrict, which was launched by the Ministry of Public Works and Public Housing, is a form of government intervention in the prevention of tidal floods in the Semarang-Demak region in the northern coastal. This development will be integrated with Semarang-Demak toll road. This decision is contradicting with the 2011-2031 Demak Urban Land-use Plan about planning of the northern Demak Regency as a Minapolitan area. According to (Larz T, 1995) the issue of regional planning is related to the inhabitants of the planning area. The readiness of the community is considered important therefore the program receives support from them. The purpose of this research is to find out how to increase the level of preparedness of the Sayung Subdistrict community towards the Semarang-Demak Toll Road development plan. This research uses the quantitative approach by using the scoring method using the Guttman scale. The result of this study is that the level of readiness of the Sayung Subdistrict community in each village is different. The lowest readiness ladder is in Sriwulan Village and Loireng Village that means no awareness as these villages on the first stage of readiness. In Purwosari Village, Sayung Village and Tambakroto Village are on the third stage of the readiness ladder that means vague awareness. Whereas Sidogemah Village and Bedono Village are on the fourth stage called pre-planning that means the most prepared villages.*

Copyright © 2016 TPWK-UNDIP

This open access article is distributed under a  
Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

Biruni, E. S. M., & Kurniawati, W. (2021). Tingkat Kesiapan Masyarakat Kecamatan Sayung Terhadap Rencana Pengintegrasian Pembangunan Tanggul Laut Dengan Jalan Tol Semarang-Demak. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Dan Kota)*, 10(2), 117-126.

## 1. PENDAHULUAN

Banjir rob merupakan banjir yang airnya berasal dari air laut. Banjir rob ini adalah banjir yang diakibatkan oleh pasangannya air laut, hingga air yang pasang tersebut menggenangi daratan. Banjir rob ini akan sering melanda atau sering terjadi di daerah yang permukaannya lebih rendah daripada permukaan air laut (Salim and Siswanto, 2018). Kenaikan muka air laut yang terus terjadi dapat menyebabkan bencana ini memiliki dampak yang semakin parah pada masa mendatang. Hal ini dikuatkan oleh pendapat (Cabanes, Cazenave and Provost, 2001) serta (Cazenave and Nerem, 2004) yang mengungkapkan bahwa hasil pemantauan secara rutin melalui satelit, fakta memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 50 tahun, 27% lapisan es di kutub utara telah mencair. Oleh karenanya, sangat tepat apabila (Sutrisno dkk, 2005 dalam Marfai *et al.*, 2014) mengungkapkan bahwa pembangunan wilayah pesisir di masa mendatang haruslah memperhatikan kerawanan banjir rob.

Banjir rob (banjir genangan) merupakan salah satu bencana yang mengancam wilayah pesisir di Indonesia (Marfai and King, 2008). Khususnya wilayah utara pulau Jawa yang rawan terhadap bencana banjir karena kondisi utara Pulau Jawa bertopografi landai sehingga banjir dapat dengan mudah masuk jauh sampai ke daratan. Bencana banjir air laut pasang (rob) menjadi ancaman yang semakin serius di wilayah

pantura, beberapa daerah yang kerap menjadi langganan banjir rob adalah Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Demak dan Jepara (Safuan, 2019).

Kecamatan Sayung merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Demak, yang terletak di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura) dan berhubungan langsung dengan Laut Jawa. Wilayah pesisir Kecamatan Sayung merupakan dataran rendah dengan topografi relatif datar, kurang dari 2%, elevasi 0–5 meter di atas permukaan air laut (Utami, Subardjo and Helmi, 2017) Hal tersebut tentu menyebabkan Kecamatan Sayung terkena dampak kenaikan muka laut. Maka menurut (Handoyo, Suryoputro and Subardjo, 2016) Kecamatan Sayung merupakan salah satu tempat di Kabupaten Demak yang sering dilanda rob. Permasalahan rob dengan rata-rata ketinggian 0,3-0,4 meter mengakibatkan jalan pantura lumpuh khususnya di Jalan Raya Kaligawe (Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, 2017). Tergengangnya Jalan Raya Kaligawe ini menyebabkan gangguan arus transportasi darat Kota Semarang yang menuju Kabupaten Demak.

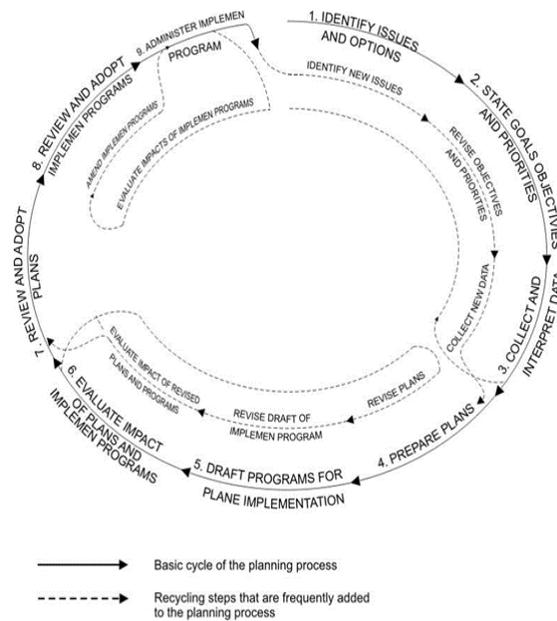
Akibat dari permasalahan rob di bagian utara Kabupaten Demak, maka pemerintah melakukan beberapa upaya pengendalian, salah satunya adalah pembangunan tanggul laut pada muara Kanal Banjir Timur sampai dengan Sungai Babon (Pantai Utara). Pembangunan tanggul laut tersebut akan dibangun dari Pesisir Utara Kota Semarang tepatnya di Kecamatan Genuk hingga pesisir utara Kabupaten Demak yang tepatnya berada di Kecamatan Sayung. Selain sebagai sabuk pantai guna membendung limpasan air laut ke daratan, tanggul laut rob tersebut direncanakan akan terintegrasi dengan Jalan tol Semarang-Demak. Sehingga pembangunan tersebut diharapkan mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu, selain sebagai tanggul penahan luapan air laut (rob) juga dapat berfungsi untuk megurangi kepadatan lalu lintas di jalan pantura (Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, 2017).

Proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak terbagi menjadi dua seksi, pada Seksi I yaitu Kota Semarang yang hanya melintasi satu kecamatan yakni, Kecamatan Genuk. Sementara untuk Seksi II yaitu Kabupaten Demak yang akan melintasi empat kecamatan yakni, Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Wonosalam, dan Kecamatan Demak (Insetyonoto and Arista, 2019). Keputusan rencana pembangunan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 355/KPTS/M/2017 tentang Pengintegrasian Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang dengan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak. Akan tetapi, pada sisi lain pemerintah Kabupaten Demak mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengembangan kawasan pesisir utara Kabupaten Demak berbasis minapolitan. Maka kedua keputusan tersebut tentunya tidak sejalan.

Definisi perencanaan wilayah dan kota menurut (Larz T, 1995) dalam Guidelines for Preparing Urban Plans yaitu, perencanaan wilayah dan kota merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang mendeskripsikan kondisi mendatang yang diinginkan dari wilayah geografis yang direncanakan yang terbagi menjadi sembilan tahap proses perencanaan. Pada tahap ke empat yaitu, prepare plans dijelaskan bahwa isu permasalahan wilayah perencanaan sangat terkait erat dengan penghuni wilayah perencanaan. Berikut merupakan sembilan tahapan perencanaan menurut Larz.

Adanya konversi lahan rencana pembangunan jalan tol Semarang-Demak di Kecamatan Sayung maka akan menyebabkan lahan tambak, pertanian dan permukiman berkurang. Hal tersebut tentunya akan memicu berbagai isu permasalahan karena guna lahan dan mata pencaharian masyarakat pada masing-masing desa yang berbeda. Maka untuk mempersiapkan masyarakat pada masa yang akan datang perlu diketahui tingkat kesiapan masyarakat agar rencana pembangunan tanggul laut yang terintegrasi dengan Jalan Tol Semarang-Demak mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat kesiapan masyarakat Kecamatan Sayung terhadap rencana pembangunan tanggul laut yang terintegrasi dengan Jalan Tol Semarang-Demak. Sasaran untuk mencapai tujuan meliputi, identifikasi kondisi fisik Kecamatan Sayung, identifikasi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Sayung, dan analisis tingkat kesiapan masyarakat Kecamatan Sayung menggunakan lima variabel *community readiness modell*.

**Gambar 1.** The Planning Process (Larz T, 1995)



Kesiapan masyarakat menurut (Edwards *et al.*, 2000 dalam Nugraha and Widyaputra, 2017) adalah “the degree to which a community is ready to take action on an issue”, atau dapat dikatakan bahwa kesiapan masyarakat merupakan sebuah kondisi sejauh mana respon masyarakat dalam menanggapi sebuah program, kebijakan, atau kegiatan yang diterapkan. Konsep Kesiapan masyarakat adalah tingkat kemauan dan persiapan dari masyarakat dalam bertindak menanggapi suatu isu. Pengukuran kesiapan masyarakat yang dikembangkan oleh Tri-Ethnic Center for Prevention Research (Oetting *et al.*, 1995) yang pada mulanya dilakukan untuk membantu mensukseskan program-program untuk menyelesaikan suatu permasalahan di masyarakat. Peningkatan kesiapan kelompok masyarakat yang cenderung lebih dinamis dan rumit memerlukan pendekatan khusus melalui model community development, salah satunya dalam bentuk partisipasi lokal dan pelayanan sosial (Toogood, 2015). Jadi dapat disimpulkan bahwa kesiapan masyarakat adalah sejauh mana suatu komunitas siap untuk mengambil tindakan terhadap suatu masalah.

## 2. DATA DAN METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesiapan masyarakat Kecamatan Sayung terhadap rencana pembangunan tanggul laut yaitu metode kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018), metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan atau metode kuantitatif ini digunakan untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh dalam bentuk angka dan secara terukur.

### 2.1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer yaitu menggunakan teknik kuisiner dan observasi lapangan. Kuisiner dibagikan kepada masyarakat Kecamatan Sayung di tujuh desa yang terlntasi rencana pembangunan tanggul laut yang terintegrasikan dengan Jalan Tol Semarang-Demak. Observasi lapangan dilakukan dengan cara mendokumentasikan guna lahan di Kecamatan Sayung

Kemudian pengumpulan data sekunder yaitu melalui survey instansional, telaah dokumen dan studi kepustakaan. Survey instansional yang dikunjungi yaitu BBWS Pemali Juana dan kantor Desa Sriwulan, Desa Bedono, Desa Purwosari, Desa Sidogemah, Desa Sayung, Desa Loireng dan Desa Tambakroto. Data yang di dapatkan dari BBWS Pemali Juana adalah kebijakan rencana program dan trase rencana pembangunan tanggul laut yang terintegrasikan dengan Jalan Tol Semarang-Demak, sedangkan data yang di dapat dari masing-masing kantor desa yaitu jumlah penduduk berdasarkan rumah tangga yang terdampak rencana konversi lahan. Telaah dokumen di dapatkan data tingkat tamatan pendidikan masyarakat Kecamatan

Sayung, mata pencaharian masyarakat Kecamatan Sayung dan peta rencana konversi lahan di Kecamatan Sayung. Studi kepustakaan di dapatkan data sembilan tahapan kesiapan kesiapan masyarakat menurut (Plested, Jumper-thurman and Edwards, 2009) yaitu, no awareness, denial, vague awareness, pre planning, preparation, initiation, stabilization, confirmation, high level community ownership.

## 2.2. Metode Penentuan Responden

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan sampling non-peluang melalui teknik accidental sampling. Menurut (Prijana, 2005) menjelaskan bahwa accidental sampling (sampling kebetulan) adalah sebuah metode yang proses pengambilan sampelnya cukup dengan mengambil siapa saja yang kebetulan ditemui oleh observer di lapangan sesuai kebutuhan studinya. Sampel tersebut kemudian dijadikan sebagai responden dalam melakukan penyebaran kuesioner. Responden yang dimaksud pada penelitian ini adalah masyarakat lokal yang tinggal menetap di Kecamatan Sayung meliputi tujuh desa yang terlintasi rencana pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yaitu Desa Sriwulan, Desa Purwosari, Desa Bedono, Desa Sidogemah, Desa Sayung, Desa Loireng, dan Desa Tambakroto. Penentuan besaran sampel yaitu menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1} = \frac{11.413}{(11.413)(0,1)^2 + 1} = 99 \text{ sampel}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi (Jumlah KK)

d : Derajat Ketelitian

Kemudian, jumlah sampel yang diambil pada masing-masing kelompok populasi ditentukan menggunakan perbandingan agar merata. Jumlah sampel diambil secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan rumah tangga pada masing-masing desa, sehingga sampel yang diperlukan pada masing-masing desa adalah sebagai berikut:

**Table 2.** Total Sampel Tiap Desa (Analisis, 2019)

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk berdasarkan Rumah Tangga	Jumlah Sampel
1	Sriwulan	3.794 KK	33 KK
2	Bedono	914 KK	8 KK
3	Purwosari	1.482 KK	13 KK
4	Sidogemah	1.596 KK	14 KK
5	Sayung	1.939 KK	17 KK
6	Loireng	871 KK	7 KK
7	Tambakroto	817 KK	7 KK
<b>Total</b>		<b>11.413 KK</b>	<b>99 KK</b>

## 2.3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan yaitu skoring dengan skala Guttman dan analisis statistik deskriptif. Skala Guttman menurut (Sugiyono, 2018) skala pengukuran dengan tipe ini, akan didapat jawaban yang tegas, yaitu “ya-tidak”; “benar-salah”; “pernah-tidak pernah”; “positif-negatif” dan lain-lain, maka data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi (dua alternatif). Skoring dengan skala Guttman digunakan pada kuesioner dengan pilihan jawaban “ya” dan “tidak”. Pada kuesioner terdapat lima variabel (Plested, Jumper-thurman and Edwards, 2009) yang ditanyakan yaitu pengetahuan masyarakat terhadap rencana program, pengetahuan masyarakat terhadap isu permasalahan, sikap masyarakat terhadap rencana program, sikap pemimpin dalam mendukung masyarakat, dan sumber daya untuk mendukung rencana program.

Pada masing-masing variabel memiliki 9 indikator yang akan diterjemahkan ke dalam pertanyaan dengan 2 pilihan jawaban yaitu, “Ya” dan “Tidak” apabila jawaban tersebut “Ya” skornya 1 dan apabila jawaban “Tidak” skornya 0. Maka ketentuannya yaitu, pada masing-masing variabel memiliki 9 pertanyaan yang akan ditanyakan secara urut kepada responden sampai responden menjawab “Tidak”, jika responden

sudah menjawab “Tidak” artinya, tidak dapat di lanjutkan pada pertanyaan berikutnya maka bisa dilanjutkan pada variabel berikutnya. Jadi untuk menghitung total skor individu yang diperoleh pada masing-masing variabel dengan cara menjumlahkan jawaban “Ya” pada setiap variabel.

Statistik deskriptif menurut (Sugiyono, 2018) statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk mengidentifikasi kondisi fisik Kecamatan Sayung, mengidentifikasi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Sayung serta menganalisis tingkat kesiapan masyarakat Kecamatan Sayung berdasar zonasi desa. Tahapan melakukan analisis deskriptif yaitu data yang telah terkumpul dan dikompilasi akan diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, pie chart dan peta.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

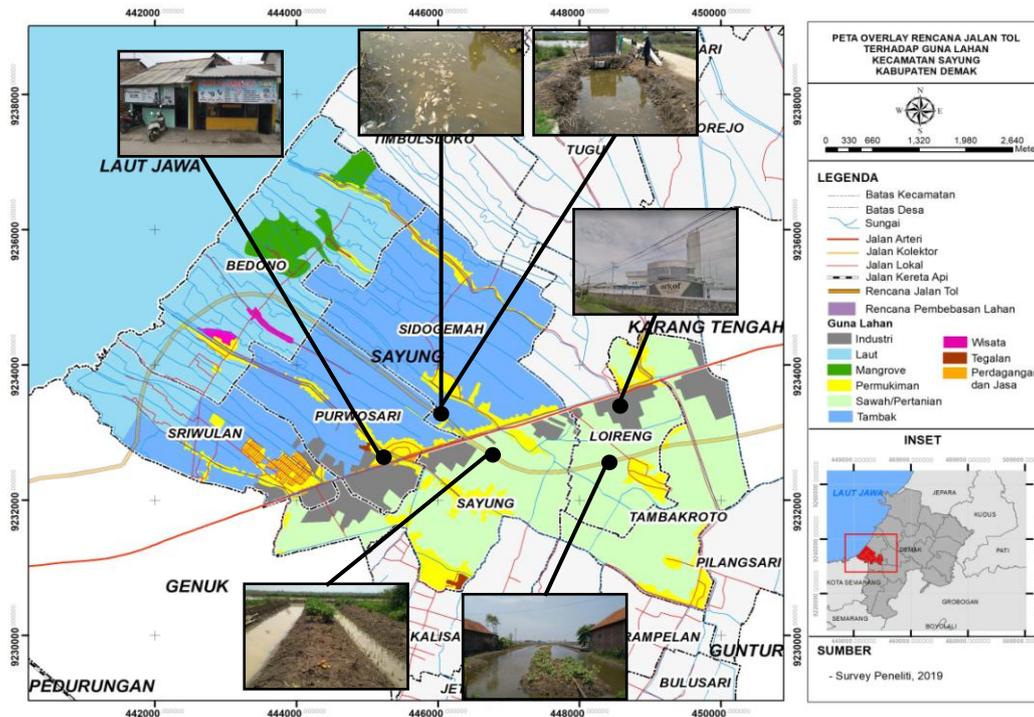
#### Identifikasi Kondisi Fisik Kecamatan Sayung

Identifikasi kondisi fisik meliputi guna lahan dan rencana konversi lahan di Kecamatan Sayung. Data ini di dapatkan dari telaah dokumen yang telah di konfirmasi ke lapangan melalui observasi lapangan. Hasil dari identifikasi ini merupakan peta tata guna lahan dan peta rencana konversi lahan. Menurut keterangan responden, beberapa lahan tambak dan pertaniannya rusak akibat pencemaran limbah industri cair yang tidak diolah terlebih dahulu sebelum dibuang.

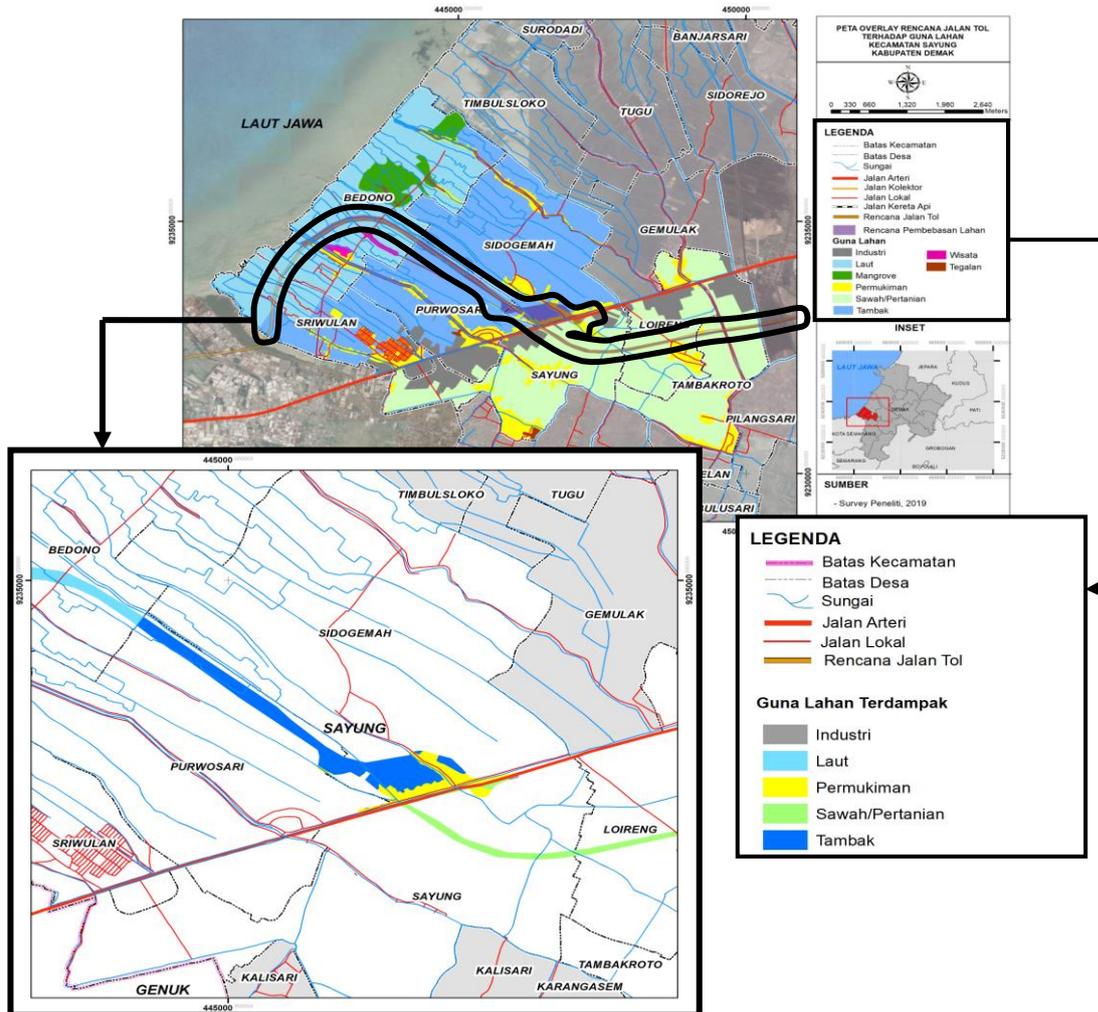
*“Lahan di sini sawah semua mbak, tapi enggak ditanami soalnya sudah tercemar industri tanahnya, pernah ditanami jagung, padi, terong tapi nggak bisa subur mbak soalnya depan situ kan pabrik kopi Arkof mbak” (Mutazam, 19 Desember 2019)*

*“Dari rencana awal pembangunan tanggul laut di Desa Sriwulan yang kena hanya lahan tambak saja mbak, tapi ini kan ada perubahan luasan lahan karena adanya abrasi. Tetapi sejauh ini warga tidak ada yang keberatan jika lahan tambaknya terkena pembebasan lahan. Karena di sini tambaknya tidak subur mbak, soalnya kan banyak industri apalagi Pokphand itu kan pabrik pakan ternak yang limbahnya pasti besar kalo enggak diolah dulu” (Carik Desa Sriwulan, 13 Desember 2019)*

Gambar 2. Peta Tata Guna Lahan di Kecamatan Sayung (Analisis, 2019)



**Gambar 3.** Peta Rencana Konversi Lahan di Kecamatan Sayung (Analisis, 2019)



Dari beberapa pernyataan di atas diketahui bahwa PT Arkof sebagai industri pengolahan kopi yang terletak di Desa Loireng menyebabkan tidak subur nya lahan pertanian di Desa Loireng serta desa sebelahnya yaitu Desa Sayung. Sedangkan industri yang mengakibatkan pencemaran lahan tambak di Desa Sriwulan yaitu, PT Charoen Pokphand. Industri tersebut merupakan industri pakan ternak yang terletak di Kecamatan Genuk Kota Semarang, karena letaknya yang berbatasan maka Desa Sayung juga menerima dampak negatif dari industri tersebut.

Berdasarkan data dari BPJT yang telah dikonfirmasi ke lapangan bahwa guna lahan yang mengalami konversi lahan akibat rencana pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, yaitu lahan tambak, lahan pertanian, dan permukiman. Progres rencana pembangunan jalan tol Semarang-Demak hingga saat ini sampai pada tahap pembebasan lahan, maka pihak BPN belum dapat memastikan luasan persil lahan yang dibebaskan pada masing-masing desa. Menurut keterangan responden, adanya konversi lahan tersebut memicu berbagai isu permasalahan.

*“kalau Desa Sriwulan yang terdampak pembebasan lahan itu hanya lahan tambak saja mbak, mungkin awalnya kurang lebih sekitar 40 hektar tetapi kemarin setelah pihak BPN melakukan pengukuran ke lapangan ternyata lahan tersebut terkena abrasi. Jadi saat ini masih dipertimbangkan kembali apakah lahan tersebut sudah termasuk laut yang tidak perlu diganti untung atau masih ada sebagian lahan tambak yang dibebaskan belum ada kepastian lagi. (Carik Desa Sriwulan, 13 Desember 2019)*

*“saat ini sedang ada pengajuan 5KK karena permasalahan aksesibilitas mbak, walaupun warga tersebut tidak terkena konversi lahan tetapi akses jalannya terputus ketika nanti dibangun jalan tol, makanya warga tersebut tetap meminta lahannya untuk diganti untung” (Carik Desa Sidogemah, 17 Desember 2019)*

“jadi yang terkena pembebasan lahan itu ada tahap A1 yang sudah pasti dan tahap A2 pengajuan, kalau yang tahap A1 ada 13KK sedangkan tahap A2 ada sekitar 3KK tetapi sepertinya kemarin ada pengajuan lagi dari beberapa warga yang merasa keberatan” (Esti Tugiarti, 25 Desember 2019)

Menurut informasi yang diperoleh dari masing-masing kepala desa, jumlah rumah tangga yang terdampak konversi lahan berbeda-beda, yaitu Desa Bedono sebanyak 5 rumah tangga, Desa Purwosari 18 rumah tangga, Desa Sayung 27 rumah tangga, Desa Tambakroto 13 rumah tangga, Desa Sidogemah 510 rumah tangga dan ada pengajuan sebanyak 5 rumah tangga.

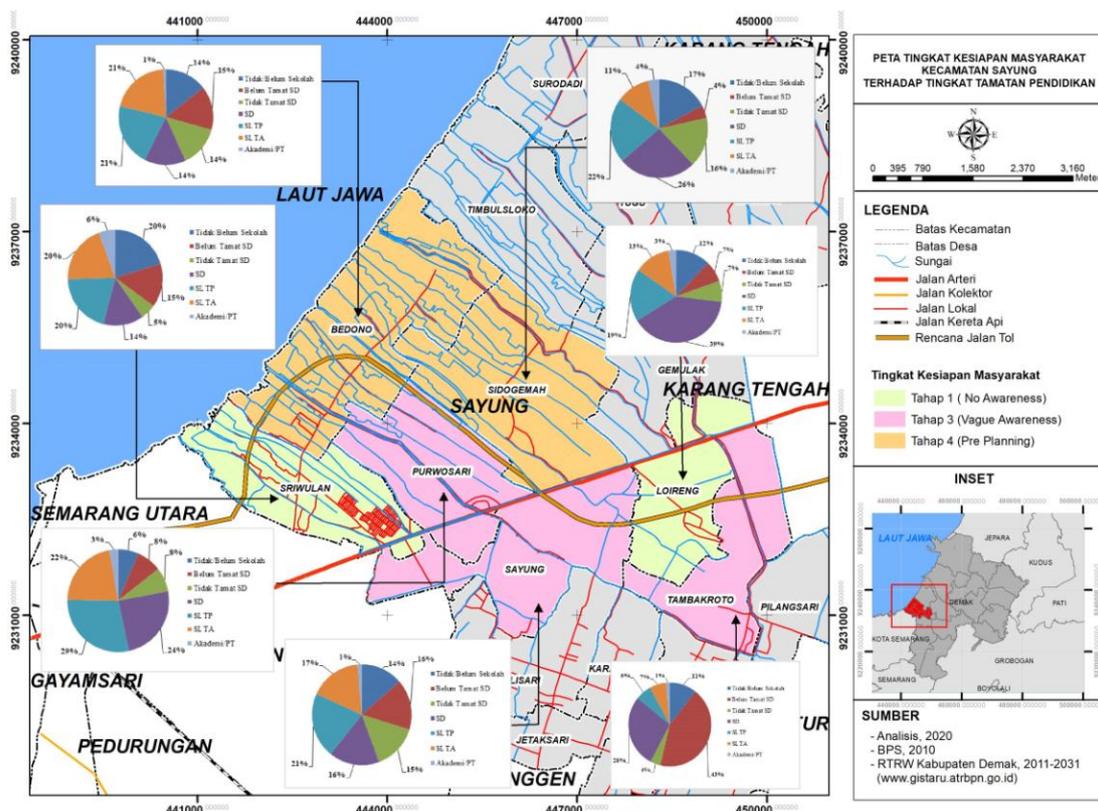
### Identifikasi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Sayung

Identifikasi sosial ekonomi masyarakat meliputi tingkat tamatan pendidikan dan mata pencaharian masyarakat Kecamatan Sayung. Data ini diperoleh dari hasil telaah dokumen yang disajikan dalam bentuk pie chart. Hasil identifikasi ini berupa pie chart yang di petakan.

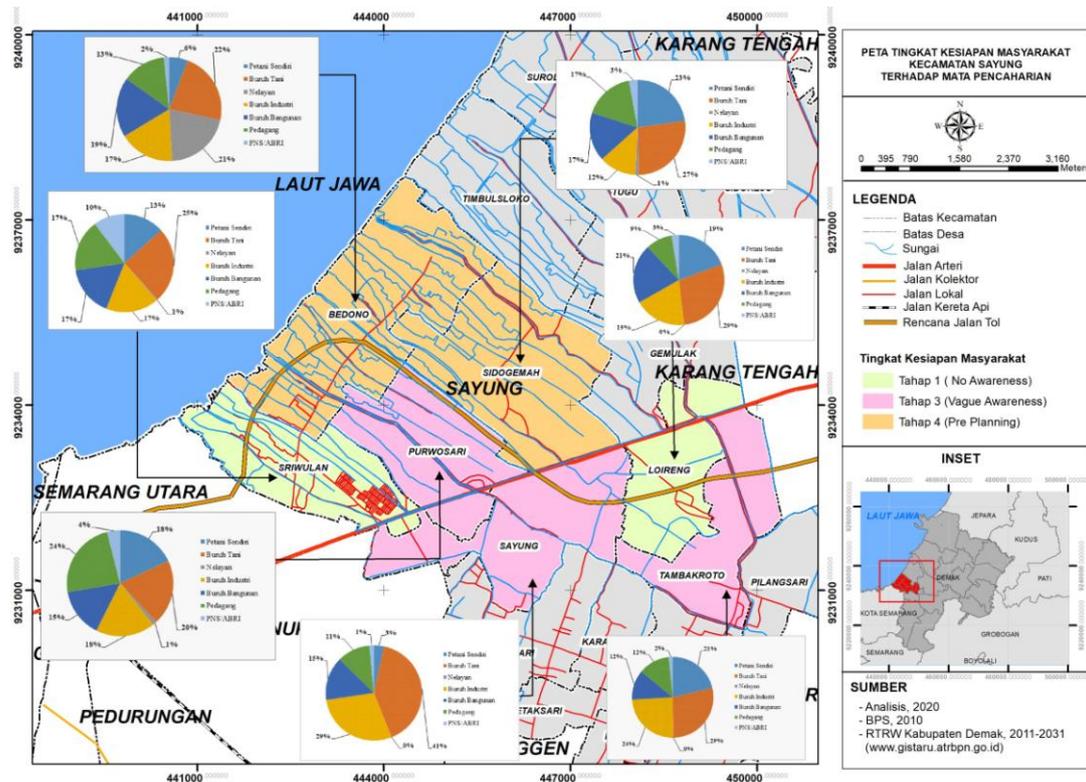
Pada peta (Gambar 4), diketahui bahwa setiap desa memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Tamatan pendidikan tertinggi Desa Sriwulan yaitu, sebesar 20% tidak/belum tamat sekolah, SLTP dan SLTA, Desa Bedono sebesar 21% SLTP dan SLTA, Desa Purwosari sebesar 29% SLTP, Desa Sidogemah sebesar 26% SD. Selanjutnya Desa Sayung sebesar 21% SLTP, Desa Loireng sebesar 39% SD dan Desa Tambakroto sebesar 43% belum tamat SD

Pada peta (Gambar.5) , diketahui bahwa mata pencaharian yang mendominasi setiap desa berbeda. Pada Desa Sriwulan, Desa Bedono, Desa Sidogemah, Desa Sayung, Desa Loireng, dan Desa Tambakroto di dominasi oleh mata pencaharian sebagai buruh tani, sedangkan Desa Purwosari di dominasi oleh mata pencaharian sebagai pedagang. Presentase mata pencaharian setiap berbeda-beda, Desa Sriwulan sebesar 25% sebagai buruh tani, Desa Bedono 22% buruh tani, Desa Sidogemah 29% buruh tani, Desa Sayung 41% buruh tani, Desa Loireng dan Tambakroto sebesar 29% buruh tani, sedangkan Desa Purwosari sebesar 24% pedagang.

Gambar 4. Peta Tingkat Tamatan Pendidikan di Kecamatan Sayung (Analisis, 2019)



**Gambar 5.** Peta Mata Pencaharian di Kecamatan Sayung (Hasil Analisis Penulis, 2019)



**Analisis Tingkat Kesiapan Masyarakat Kecamatan Sayung**

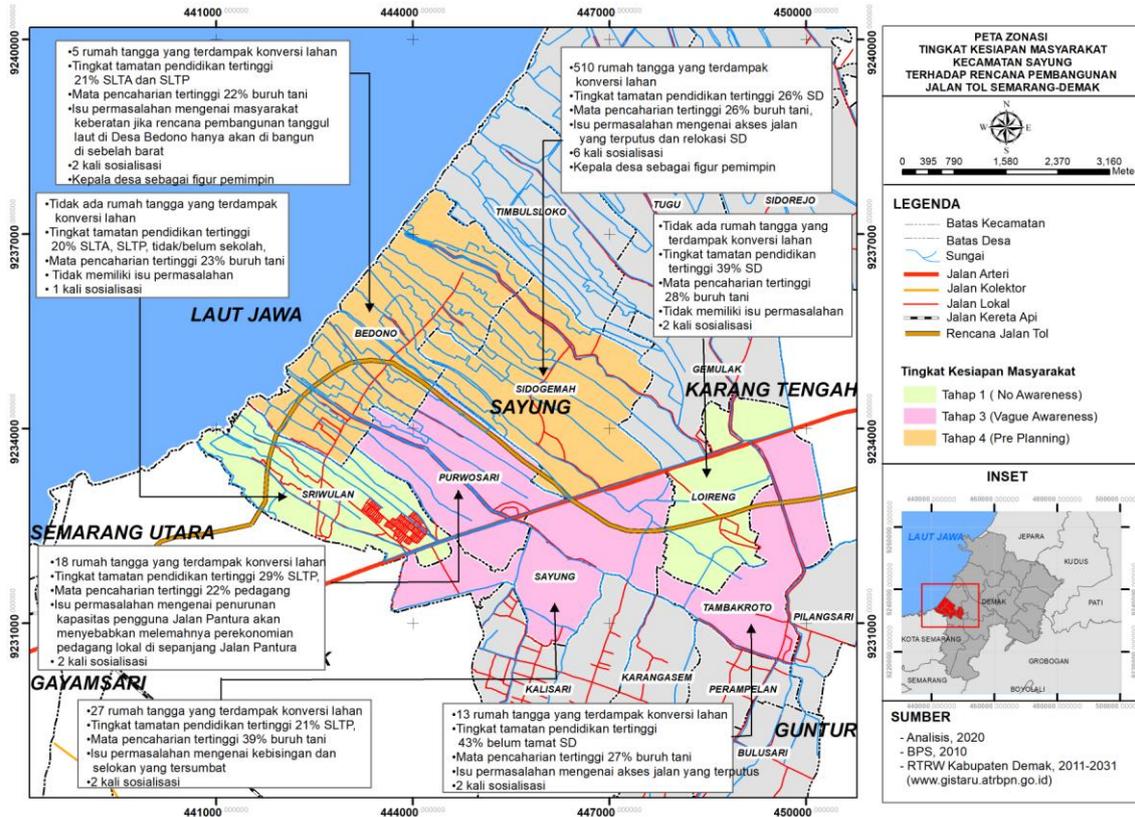
Tingkat kesiapan masyarakat Kecamatan Sayung terhadap rencana pembangunan tanggul laut yang terintegrasi dengan jalan tol Semarang–Demak pada masing-masing desa berbeda-beda. Tangga kesiapan terendah berada pada Desa Sriwulan dan Desa Loireng yang menempati tangga kesiapan 1 (satu), yaitu no awareness. Pada Desa Purwosari, Desa Sayung dan Desa Tambakroto berada pada tangga kesiapan 3 (tiga), yaitu vague awareness. Sedangkan tangga kesiapan tertinggi berada pada Desa Sidogemah dan Desa Bedono yang menempati tangga kesiapan 4 (empat), yaitu pre planning.

Desa Sriwulan dengan tingkat kesiapan no awareness, tidak ada rumah tangga yang terdampak konversi lahan. Tingkat tamatan pendidikan tertinggi yaitu, sebesar 20% tamat pendidikan SLTA, SLTP dan tidak/belum sekolah. Mata pencaharian tertinggi sebesar 23% sebagai buruh tani. Masyarakat di Desa Sriwulan hanya sekedar mengetahui rencana program tanpa memiliki isu permasalahan. Sosialisasi rencana program di Desa Sriwulan pernah dilaksanakan sekali pada tahun 2017 yang membahas tentang pemberitahuan mengenai lahan yang akan di bebaskan.

Desa Loireng dengan tingkat kesiapan no awareness, tidak ada rumah tangga yang terdampak konversi lahan. Tingkat tamatan pendidikan tertinggi yaitu, sebesar 39% tamat SD. Mata pencaharian tertinggi sebesar 28% sebagai buruh tani. Masyarakat di Desa Loireng hanya sekedar mengetahui rencana program tanpa memiliki isu permasalahan. Sosialisasi rencana program di Desa Loireng pernah dilaksanakan dua kali pada tahun 2017 yang membahas tentang pemberitahuan dan penetapan lahan yang akan di bebaskan.

Desa Purwosari dengan tingkat kesiapan vague awareness, sebesar 18 rumah tangga yang terdampak konversi lahan. Tingkat tamatan pendidikan tertinggi yaitu, sebesar 29% tamat SLTP. Mata pencaharian tertinggi sebesar 22% sebagai pedagang. Masyarakat di Desa Purwosari memiliki isu permasalahan terkait kekhawatiran masyarakat jika kapasitas pengguna Jalan Pantura menurun maka akan berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang maupun menjual jasa di sepanjang Jalan Pantura. Sosialisasi di rencana program di Desa Purwosari pernah dilaksanakan dua kali pada tahun 2017 yang membahas tentang pemberitahuan dan penetapan lahan yang akan di bebaskan.

Gambar 6. Peta Tingkat Kesiapan di Kecamatan Sayung (Analisis, 2019)



Desa Sayung dengan tingkat kesiapan vague awareness, sebesar 27 rumah tangga yang terdampak konversi lahan. Tingkat tamatan pendidikan tertinggi yaitu, sebesar 21% tamat SLTP. Mata pencaharian tertinggi sebesar 39% sebagai buruh tani. Masyarakat di Desa Sayung memiliki isu permasalahan terkait kekhawatiran masyarakat jika nanti akan dibangun jalan tol Semarang-Demak akan mengganggu permukimannya seperti bising dan selokan yang tersumbat. Sosialisasi di rencana program di Desa Sayung pernah dilaksanakan dua kali pada tahun 2017 yang membahas tentang pemberitahuan dan penetapan lahan yang akan di bebaskan.

Desa Tambakroto dengan tingkat kesiapan vague awareness, sebesar 13 rumah tangga yang terdampak konversi lahan. Tingkat tamatan pendidikan tertinggi yaitu, sebesar 43% belum tamat SD. Mata pencaharian tertinggi sebesar 27% sebagai buruh tani. Masyarakat di Desa Tambakroto memiliki isu permasalahan terkait akses jalan yang terputus akibat rencana konversi lahan. Sosialisasi di rencana program di Desa Sayung pernah dilaksanakan dua kali pada tahun 2017 yang membahas tentang pemberitahuan dan penetapan lahan yang akan di bebaskan.

Desa Sidogemah dengan tingkat kesiapan pre planning, sebesar 510 rumah tangga yang terdampak konversi lahan. Tingkat tamatan pendidikan tertinggi yaitu, sebesar 26% tamat SD. Mata pencaharian tertinggi sebesar 26% sebagai buruh tani. Masyarakat di Desa Sidogemah memiliki isu permasalahan terkait akses jalan yang terputus akibat rencana konversi lahan dan adanya relokasi SD, tetapi hal tersebut sudah direspon oleh pemimpin desa terkait akses jalan yang terputus sudah ada pengajuan kepada pemerintah pusat dan terkait relokasi SD sudah disediakan untuk relokasi SD tersebut. Sosialisasi di rencana program di Desa Sidogemah pernah dilaksanakan sebanyak enam kali, sebanyak dua kali pada tahun 2017 yang membahas tentang pemberitahuan dan penetapan lahan yang akan di bebaskan dan enam kali di tahun 2019 untuk pembayaran. Maka dari 510 rumah tangga yang terdampak pembebasan lahan, terdapat 120 rumah tangga sudah menerima ganti untung.

Desa Bedono dengan tingkat kesiapan pre planning, sebesar 5 rumah tangga yang terdampak konversi lahan. Tingkat tamatan pendidikan tertinggi yaitu, sebesar 21% tamat SLTA dan SLTP. Mata pencaharian tertinggi sebesar 22% sebagai buruh tani. Masyarakat di Desa Bedono memiliki isu permasalahan terkait, masyarakat Desa Bedono bagian timur megkhawatirkan jika tanggul laut hanya akan dibangun di bagian barat, karena rob akan meluap ke Desa Bedono bagian timur, maka dengan adanya kekhawatiran tersebut pemimpin desa mengusulkan kepada pemerintah pusat bahwa pembangunan tanggul laut di Desa Bedono

tidak hanya dibangun di bagian barat desa tetapi di sepanjang tepi laut Desa Bedono. Sosialisasi di rencana program di Desa Bedono pernah dilaksanakan dua kali pada tahun 2017 yang membahas tentang pemberitahuan dan penetapan lahan yang akan di bebaskan.

#### 4. KESIMPULAN

Tingkat kesiapan masyarakat pada masing-masing desa berbeda. Tangga kesiapan terendah berada pada Desa Sriwulan sebesar 0,60 dan Desa Loireng sebesar 0,97 maka kedua desa tersebut berada pada tangga kesiapan 1 (satu), yaitu no awareness. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi pada Desa Sriwulan dan Desa Loireng karena pelaksanaan sosialisasi pada masing-masing desa berbeda, sehingga masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda terhadap rencana program. Sedangkan Desa Purwosari sebesar 2,36, Desa Tambakroto sebesar 2,45 dan Desa Sayung sebesar 2,49 maka 3 (tiga) desa tersebut berada pada tangga kesiapan vague awareness. Pada tahap ini mayoritas masyarakat pada Desa Purwosari, Desa Tambakroto dan Desa Sayung sudah memahami isu permasalahan, akan tetapi belum ada figure pemimpin desa seperti keta RT, ketua RW, kepala desa, maupun kelompok komunitas. Tangga kesiapan tertinggi berada pada Desa Bedono sebesar 3,15 dan Desa Sidogemah sebesar 3,74 maka kedua desa tersebut berada pada tangga kesiapan 4 (empat), yaitu pre planning. Pada tahap ini mayoritas telah memahami isu permasalahan dan telah ada figure pemimpin desa, figure pemimpin desa yang dimaksud yaitu kepala desa.

#### 5. REFERENSI

- Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana (2017) 'Laporan Akhir Detail Desain Tanggul Laut Rob Semarang', pp. 1–6.
- Cabanes, C., Cazenave, A. and Provost, C. Le (2001) 'Sea Level Rise During Past 40 Years Determined from Satellite and in Situ Observations', 294(October), pp. 840–843.
- Cazenave, A. and Nerem, R. S. (2004) 'Present - Day Sea Level Change : Observations and Causes', (2003), pp. 1–20.
- Edwards, R. W. *et al.* (2000) 'Article Community Readiness : Research to Practice', 28(97), pp. 291–307.
- Handoyo, G., Suryoputro, A. A. D. and Subardjo, P. (2016) 'Genangan Banjir Rob Di Kecamatan Semarang Utara', 19(1), pp. 55–59.
- Insetyonoto and Arista, B. (2019) 'Jalan Tol Semarang-Demak Melewati 21 Desa dan Kelurahan'.
- Larz T, A. (1995) *Guidelines for Preparing Urban Plans*. Chicago: Planners Press.
- Marfai, M. A. *et al.* (2014) 'Dampak bencana banjir pesisir dan adaptasi masyarakat terhadapnya di kabupaten pekalongan'.
- Marfai, M. A. and King, L. (2008) 'Coastal flood management in Semarang , Indonesia', pp. 1507–1518. doi: 10.1007/s00254-007-1101-3.
- Nugraha, D. H. and Widyaputra, P. K. (2017) 'Kesiapan Masyarakat Tambaklorok dalam Menerima Rencana Revitalisasi Kawasan Menggunakan Teknologi Apung'.
- Oetting, E. R. *et al.* (1995) 'Assessing Community Readiness for Prevention', 30(6), pp. 659–683.
- Plested, B. A., Jumper-thurman, P. and Edwards, R. W. (2009) 'Community Readiness Manual', *Prevention*, p. 65.
- Prijana (2005) *Metode Sampling Terapan untuk Penelitian Sosial*. Bandung: Humaniora.
- Safuan, A. (2019) *Banjir Rob Masih Menjadi Ancaman Serius di Pantura*.
- Salim, M. A. and Siswanto, A. B. (2018) 'Penanganan Banjir dan Rob di Wilayah Pekalongan'.
- Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Toogood, F. M. (2015) 'Participation , Partnerships and Pilots in Community Development Policy Article Participation , Partnerships and Pilots in Community Development Policy', 1, pp. 4–14.
- Utami, W. S., Subardjo, P. and Helmi, M. (2017) 'Studi Perubahan Garis Pantai Akibat Kenaikan Muka Air Laut di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak', 6, pp. 281–287.